

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terhadap sengketa pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Andalas berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 14/G/2024/PTUN.PDG, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Uraian kasus sengketa pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ini bermula dari terbitnya keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 1418/UN16.26.R/KPT/VI/2024 tentang pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Andalas, yang mana diketahui bahwa Ketua LPM atas nama Nilda Tri Putri sebagai Dosen aktif di Universitas Andalas. Pihak penggugat mengaku mengalami kerugian akibat adanya keputusan tersebut, karena pemberhentian tersebut menyebabkan ia kehilangan jabatannya sebagai Ketua LPM dan tidak lagi menerima tunjangan atas tugas tambahan tersebut, termasuk tunjangan kinerja sebagai Ka.LPM (Grade 15), yang diketahui sudah tidak diberikan lagi sejak April.

1.1.2 Majelis Hakim menyatakan bahwa Keputusan Rektor memenuhi unsur KTUN sesuai Undang-Undang No.5 Tahun1986 jo. Undang-Undang No.51 Tahun2009, sehingga layak diuji di PTUN. Sebagai PTN Badan Hukum, Universitas Andalas juga tunduk pada Undang-UndangNo.12 Tahun 2012 dan PP No. 95 Tahun 2021, menegaskan kewenangan PTUN. Prosedur gugatan sah secara formil karena penggugat telah melakukan keberatan dan banding, sesuai ketentuan Perma No.6 Tahun 2018. Secara khusus, hakim mempertimbangkan Peraturan Rektor Universitas Andaslas No.8 Tahun 2022, terutama Pasal 220 huruf b yang menyebutkan bahwa ketua

LPM dapat diberhentikan jika tidak memenuhi persyaratan yang berarti hanya keadaan hukum baru yang menjadi alasan pemberhentian. Berdasarkan ini, hakim menilai bahwa alasan pemberhentian tidak terbukti secara materiil. Dengan kata lain, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa ketua LPM sudah tidak memenuhi syarat jabatan. Karena itu, keputusan pemberhentian jabatan ini dinilai bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak memiliki dasar hukum yang sah.

- 5.1.3.** Penyelesaian kasus sengketa yang termuat dalam putusan PTUN Padang No 14/G/2024/PTUN.PDG termasuk ke dalam bahasan *siyasah idariyah* karena membahas tentang wewenang antar badan publik pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam pemerintahan, yakni dalam kasus ini adalah wewenang antara Rektor Universitas Andalas dan Nilda Tri Putri sebagai Ketua LPM. Dengan putusan tersebut, diharapkan terciptanya kelembagaan Universitas Andalas yang lebih baik untuk masa kini hingga masa yang akan datang. Sebagaimana tata cara dan metode untuk menjalankan suatu pemerintahan dengan baik dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Permasalahan dalam putusan ini tidak sesuai dengan tujuan dan kajian *siyasah idariyah*, baik dari segi tujuan maupun pendekatan yang digunakan. Dalam hal ini Hakim mempertimbangkan indikator-indikator pencapaian pemerintahan yang baik, prinsip kepastian hukum dan transparansi. Dengan adanya ketidak sesuaian tersebut, putusan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus alternatif pembelajaran dalam menciptakan pemerintahan yang baik di masa depan.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi masyarakat atau pembaca yang mengalami kasus serupa, khususnya pemberhentian dari jabatan Ketua LPM, disarankan untuk menempuh jalur hukum melalui PTUN setempat agar mendapatkan keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku;

5.2.2 Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan kajian, mengingat penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam menggambarkan objek kajian secara menyeluruh. Selain itu, proses pengumpulan data ke depan sebaiknya menggunakan metode yang dinilai lebih efektif agar hasil penelitian lebih optimal;

5.2.3 Bagi peneliti lain yang ingin mendalami isu pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu di lingkungan universitas, disarankan untuk menggalilebih banyak sumber maupun referensi yang relevan. Dengan begitu, hasil penelitian bisa menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

UIN IMAM BONJOL
PADANG



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmat Rosyadi, H.M. Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al Sultaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Darul Falah, 2006.
- Almubarak, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Journal ISTIGHNA* , 2018: 3.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Aryani, Laela. *Implementasi Good Governance Di Desa Rempoh Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyyah*. Purwokerto: UIN Purwokerto, 2020.
- Azzahrawi, dkk. "Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif ." *Syiah Kuala Law Jurnal Vol 3 No. 2* , 2019: 206.
- Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Kuala Lumpur: Gema Insani, 2007.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Bappenas. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional ." 1-5. Jakarta: Bappenas, 2014.
- Crosby, P.B. *Quality is Free* . New York: New American Library, 1979.
- Deming, E.W. *Out Of Crisis*. Cambridge: Massachussets Institute Of Technologi, 1986.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Fahmi, Muhammad. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Pelita 2* (2017): 49.

- H. Abdul Khair, dkk. "Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif." *Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara Vol.31 Nomor 3*, 2016: 416.
- Hasibuan, Ahmad Dahlan. "Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Puusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No : 17/G/2000/PTUN.MDN)." *Jurnal Mercatoria Vol.6 Nomor 2*, 2013: 134.
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah Konsektualitas Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Lantapon, Garry T. "Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." *Lex Crimen Vol. VII No. 4*, 2018: 128.
- Lestari, Ika Ayu. *Tinjauan Siyasah Idariyah Teradap Putusan PTUN Padang Nomor 31/G/2024/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguk Kabupaten Solok*. Padang: Skripsi, 2023.
- Marbun, Robinsar. "Transformasi Upaya Adminstratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian." *Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2*, 2017: 209.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2008.
- Mu'allim, Amir. "Maslahah Mursalah : Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum No. 24 Vol.10*, 2003: 75-76.
- Muhaimin, L.J. *Peningkatan Dan Pengembangan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di PTAIN*. Jakarta: UIN Malang, 2006.

Muhajir. *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan sistim ketatanegaraan Islam Epilog: Prof. Dr. Moh. Mahfud MD*. Yogyakarta: IRCISOD, 2017.

Muhammad. "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kkinerja Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Fikih*, 2023: 57.

Muhammad, Fiqri Rizaldi. "Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar Periode 2024 Berdasarkan Siyasah Idariyah Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Ma'had Al-Zaytun." *Journal Of Islamic Studies*, 2024: 333.

Narbuko, Ahmadi Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Nugroho, Yuniarto Wiryo. "Analisis Peraturan Rektor dan Peraturan Senat Mengenai Kedudukan, Fungsi, dan Materi Muatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal WidyaloKa*, 2023: 142.

Oktaviyanti, Tiara Ike. *Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)*. Skripsi, 2023.

Peraturan, Rektor. *Tentang Organ dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas Pasal 218*. Rektor UNAND Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 218.

Prahastapa, Anita Marlin restu. "Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya UU No 30 Tahun 2014 dan UU No 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha negara (TUN)." *Diponogoro Law Journal*, 2017: 5.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Putusan, PTUN. *Tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Andalas*. PTUN Nomor : 14/G/2024/PTUN.PDG.

—. *Tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Andalas*.
PTUN Nomor : 14/G/2024/PTUN.PDG.

Rahmawati. "Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global* , 2018 : 58.

Respationo, H.S. "Putusan Hakim Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Yustisia Vol 2*, 2013: 103-104.

Rio, Mohammad Bagas. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Jurnal Hukum*, 2021.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2004.

Sagala, S. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan : Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi, dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah* . Bandung: Alfabeta, 2009.

Satoto, Sukamto. *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004.

Sely Agustina, Mohammad Bagas Rio R, and Rahma Kemala Dewi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia ." *Cakrawla : Jurnal Kajian Mnajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 2021: 243.

Subhan, Alwan. "Sistem Penjaminan Mutu Dan Pengawasan Pendidikan Tinggi." *Jurnal al-Fikrah*, 2020: 82.

Sucy Ramadhani, Sudi Prayitno, Hidayati Fitri, Emrizal. "Disharmonisasi Wewenang Wali Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* , 2022: 463.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sunggono, Bambang. *Metodolgi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Syarif, Ibnu Mijar. *Fiqh Siyasah "Doktrin dan Pemikiran Politik Islam"* . Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008.

Weda, N. K. "Penerapan Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 1/G/2017/PTUN.DPS)." *Jurnal Prefensi Hukum*, 2021: 30.

Wijono, D. *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.



UIN IMAM BONJOL
PADANG